



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sengketa Hasil Pilkada Boven Digoel, Kembali Digugat

Jakarta, 13 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Boven Digoel pada Jumat (13/08) pukul 13.30 WIB. Persidangan yang digelar secara daring ini dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto. Sidang dengan Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri.

Pada sidang putusan sebelumnya, MK Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 bertanggal 11 Desember 2020. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

Pasca pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon, Pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara tersebut karena terdapat kecurangan dan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut Pemohon meminta MK membatalkan keputusan Termohon. (tir)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130